

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. *Grand Theory*

2.1.1. *Agency Theory*

Agency theory menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama agen tersebut Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Selanjutnya Jansen and Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Mereka juga menyatakan bahwa konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Zhuang et al., (2000) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara pemegang saham dengan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan manajemen dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak bisa secara

efektif mengendalikan manajemen. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab agen, prinsipal dapat mengukur, menilai dan sekaligus mengawasi kinerja agen sampai sejauh mana agen telah bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Jensen dan Ruback (1983) berargumen bahwa manajer yang tidak berkualitas yang bertahan untuk bisa digantikan merupakan perwujudan dari masalah keagenan yang paling mahal dilihat pada hasil laporan keuangan yang dipublikasi.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada Para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan yang berkaitan dengan pemilihan auditor yang berkualitas. *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor (Susiana dan Herawaty, 2007).

2.1.2. Corporate Governance

Istilah *corporate governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu misalnya dari disiplin ilmu hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat, bahkan disiplin ilmu agama (Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai *Corporate Governance*, 2006). Hal ini membuat *corporate governance* seringkali didefinisikan secara berbeda

oleh para pakar. Namun, ada beberapa definisi yang dikenal secara luas, antara lain definisi yang dikeluarkan oleh *World Bank*, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

World Bank mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practices, which enables a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently and thereby perpetuate itself by generating long term economic value for its shareholders and society as a whole.”

Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan- sasaran *corporate governance* dan suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni et al., 2004). Kinerja berbasis akuntansi merupakan kinerja yang dilihat dari segi keuangan perusahaan, sehingga dikatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat *profitabilitas* perusahaan. Menurut Berge dan Ridden (1999) dalam Deni et al., (2004) menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good corporate governance* tidak mudah dilakukan. Mekanisme *corporate governance* terdiri dari kepemilikan saham, dewan komisaris dan efektifitas komite audit.

Penerapan *corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai *codes of corporate governance* hampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey Report (1994) dalam

Siallagan dan Mas'ud (2006), mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan bagi pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan publik.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yaitu digunakan yaitu

- a. **Kepemilikan saham institusional** disebut sebagai investor yang canggih (*Sophisticated*) karena adanya pemegang saham seperti institusional *ownership* memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi institusional *ownership* sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Maulana, 2012).
- b. **Kepemilikan saham manajerial** yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan kata lain biaya kontrak dan

pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al., 1988)

- c. **Ukuran dewan komisaris** yaitu wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggungjawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002). Sebagai wakil dari prinsipal di perusahaan dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggungjawab sosial adalah karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam perusahaan. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pemilihan auditor yang berkualitas sehingga fungsi dari dewan komisaris menginginkan peningkatan citra perusahaan yang baik dan relevan.
- d. **Efektifitas komite audit** yaitu menurut penelitian Balafif (2010) menyatakan bahwa banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti penelaahan laporan dan seleksi auditor eksternal. Komite audit tidak mempertanyakan secara kritis maupun menganalisis secara mendalam kondisi

pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan hanya saja karena banyak dari anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, melainkan juga karena banyak dari mereka yang belum memahami peran utamanya (Mango, 1996). Dalam penelitian Kalbers dan Fogarty (1993) mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite auditor dalam mengemban tugasnya. Ketiga faktor tersebut adalah kewenangan formal dan tertulis dari komite audit, kerjasama manajemen dan kualitas (kompetensi) anggota komite audit. Selain itu, efektifitas kerja komite audit juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan dan tingkat intensitas komunikasi antar komite audit dengan berbagai pihak.

2.1.3. Fungsi Audit Eksternal

Tanggungjawab utama auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Tujuan auditor adalah menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk periode tersebut. Mereka juga harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya, dan bahwa aktiva telah diamankan dengan semestinya.

Auditor eksternal memiliki fokus yang sempit (Messier, 2005:7). Auditor eksternal tidak terlalu memperhatikan kecurangan atau pemborosan yang tidak memiliki dampak yang signifikan, atau tidak material terhadap laporan keuangan. Kualitas jasa auditor eksternal dalam proses pelaksanaan pemeriksaan sangat

ditentukan oleh kemampuan auditor eksternal menerapkan norma pemeriksaan dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan ini didukung dengan hasil penilaian program jaminan kualitas.

Posisi akuntan mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang handal bagi pihak - pihak yang berkepentingan sehingga auditor eksternal harus dinilai sebagai pihak yang independen dan kompeten bagi pengguna laporan keuangan (Oktabella, 2011). Independen dan kompetensi auditor eksternal dapat menjadi tolak ukur kualitas jasa yang diberikan. Meningkatnya nilai audit atau kualitas audit ditentukan oleh seberapa berguna dan berharganya jasa yang diberikan oleh auditor eksternal, sehingga auditor eksternal dituntut untuk bertindak dengan profesional yang tinggi (Susiana dan Herawati,2007 dalam Oktabella, 2011).

Pada pernyataan Standar Akuntansi No. 02 (SA Seksi 110) mengenai tanggung jawab dan fungsi auditor independen, dinyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Pada pernyataan Standar Akuntansi No. 48 (SA Seksi 380) mengenai komunikasi dengan komite audit, dinyatakan bahwa masalah-masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit harus dikomunikasikan kepada auditor kepada orang yang memiliki tanggung jawab dalam proses pelaporan keuangan, dalam hal ini komite audit. Auditor juga harus menjamin bahwa komite audit menerima informasi tambahan tentang lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

1.1.4. Kualitas Audit Eksternal

Dalam Aksu et al. (2007) menyebutkan penelitian Firth dan Smith (1992) dan De Fond (1992) yang menyatakan bahwa audit adalah produk yang terdiferensiasi pada kualitas. Namun, kualitas dari pekerjaan audit sulit diobservasi dan diukur secara langsung, sehingga beberapa penelitian telah mengembangkan ukuran-ukuran pengganti untuk mengevaluasi kualitas audit, diantaranya ukuran kantor akuntan publik (DeAngelo, 1981; Palmrose, 1988), jangka waktu perikatan audit (Simunic & Stein, 1987), struktur audit (Knapp, 1991), dan komposisi keahlian industri auditor (Schauer, 2002). Auditor yang berkualitas hendaknya memiliki independensi, kemampuan yang memadai, dan integritas yang tinggi.

DeAngelo (1981) berpendapat bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan ukuran dari kantor akuntan publik serta *market share* dari kantor akuntan publik tersebut. Francis dan Khrisnan (1999) berpendapat bahwa auditor yang lebih besar akan menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi karena mereka ingin menjaga reputasi mereka dan menghindari litigasi-litigasi yang akan memakan biaya besar. Pada umumnya, kantor akuntan publik besar akan memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi, keahlian industri yang lebih baik, serta kemampuan yang lebih baik pula dalam menemukan dan melaporkan ketidakwajaran dan salah saji pada pelaporan keuangan perusahaan (DeFond, 1992; Reed, Trombley, & Dhaliwal, 2000). Palmrose (1986) mengatakan bahwa kantor akuntan publik akan meminta *fee* yang tinggi untuk menunjukkan kualitas tinggi pada jasa audit yang mereka berikan. Palmrose menemukan hubungan positif yang signifikan antara ukuran kantor akuntan publik dan *audit fee*. Tingginya *audit fee* yang dikenakan kepada klien tentunya akan berpengaruh positif pada pendapatan kantor akuntan publik itu sendiri sehingga jumlah pendapatan suatu kantor akuntan publik bisa dijadikan sebagai salah satu proksi kualitas audit.

1.1.5. Proses Pemilihan Auditor Eksternal

Dalam memastikan penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Pemilihan auditor eksternal merupakan tanggung jawab komite audit berdasarkan piagam komite audit yang

didalamnya mengatur tentang proses seleksi dan penunjukan auditor eksternal, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan oleh perusahaan pemegang saham akan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang ditentukan didalam RUPST.

Komite Audit mempunyai kewenangan yang luas berkaitan dengan Auditor Eksternal (KAP), dimulai proses seleksi, rekomendasi penunjukan, mengevaluasi independensi, reviuw/mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit sampai mereviu pelaporan serta memonitor tindak lanjut hasil Audit. Pemilihan dan penunjukan Auditor Ekstern (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan, tetap mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku bagi perusahaan, namun melibatkan Komite Audit, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai fungsinya (Piagam Komite Audit, 2010).

Dalam proses seleksi, Komite Audit mereviuw terlebih dahulu *Terms of Reference* (TOR) dan *Request for Proposal* (usulan penawaran) yang telah disiapkan oleh Panitia Pengadaan sebelum dikirim kepada calon peserta (KAP) yang dianggap mampu. Komite Audit mereviuw rencana audit dari auditor ekstern (KAP) untuk menentukan apakah sesuai dengan kebijakan audit yang telah disahkan agar pelaksanaannya berjalan seperti yang diharapkan. Rencana Audit menjelaskan tentang sifat/jenis audit, jadwal waktu, sumberdaya yang dibutuhkan dan cakupan ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti resiko pengendalian internal serta kompleksitas kegiatan yang akan

diaudit (Piagam Komite Audit,2010).

Komite Audit harus memelihara hubungan baik dengan auditor eksternal (KAP) selama pelaksanaan audit berlangsung dan mengevaluasi secara terus menerus kualitas pelaksanaan tugas Auditor eksternal dengan cara memantau, memperoleh informasi, melakukan diskusi atau rapat.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Mekanisme *corporate governance* telah menjadi *issue* yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah. Penelitian yang meneliti mengenai *corporate governance* dan pemilihan auditor eksternal masih sedikit diketemukan. Meskipun demikian, penelitian dengan fokus tersebut menumbuhkan gagasan bahwa pemilihan auditor eksternal diharapkan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Beberapa perbedaan penelitian tentang *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Z. Jun Lin, Ming Liu (2009)	Independent: Ukuran dewan pengawas, kualitas CEO, Dewan direksi Dependent : Audit Eksternal	Regresi Berganda	Hasil empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan pemegang saham yang lebih besar atau. CEO dan ketua dewan komisaris adalah prang yang sama maka akan kecil kemungkinan untuk menyewa 10 top auditor di

				china. Sehingga lemahnya perusahaan dalam memilih auditor yang berkualitas karena kurangnya manfaat yang ada dalam mekanisme <i>corporate governance</i> diperusahaan tersebut.
2	Ashbaugh, H and Therry D.W (2003)	Independent Pemilihan Auditor Dependent Creditor Stakeholders, Dispersed stakeholders, Closely Held Shareholders, Regulator, Foreign Suppliers. Control : ROE dan Size	Regresi Logistik	Bahwa perusahaan-perusahaan yang sahamnya dipegang oleh pemegang saham institusional kecil kemungkinan untuk menyewa perusahaan audit yang dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan audit yang memainkan peran tata kelola perusahaan ketika perusahaan memiliki stakeholder yang menuntut informasi keuangan yang dapat diandalkan.
3	Elinda Suwardani (2012)	Independen : Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Dependen : <i>Auditor Selection</i>	Regresi Logistik	Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan, komisaris independen tidak berhubungan dengan pemilihan auditor eksternal (<i>auditor selection</i>), sedangkan variabel kepemilikan managerial, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berhubungan positif terhadap pemilihan auditor eksternal (<i>auditor selection</i>).
4	Markali dan	Independen :	Regresi	Hasil penelitian

	Rudiawarni (2012)	Auditor Eksternal Dependent : Dewan Komisaris, Kepemilikan Sahara dan Proporsi Komisaris Independent	Logistik	menyatakan bahwa apabila mekanisme internal corporate governance perusahaan baik maka akan menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk memilih auditor yang berkualitas.
5	Anderson et, al (2004)	Peran insentif dalam mengelola penghasilan dan evaluasi auditor dalam penyediaan informasi manajemen	Studi Eksperimen dengan 113 Auditor	Auditor melakukan perencanaan penilaian terutama ditentukan oleh insentif manajer untuk mengelola laba, dan bahwa kualifikasi kompetensi tidak mempengaruhi penilaian perencanaan auditor. Fokus pada insentif konsisten dengan auditor menghadapi kekhawatiran regulator terbaru, tentang manajemen laba. Namun, seperti fokus menyiratkan bahwa ketika kemungkinan manajemen laba muncul rendah, auditor gagal untuk memperhitungkan informasi akuntansi. Dalam hal ini bisa dibilang relevan dengan penilaian perencanaan mereka (yaitu, penilaian tentang resiko salah saji dan ketergantungan pada

				penjelasan untuk tujuan perencanaan audit).
6	Desti Maharani (2012)	Independent: presentasi kepemilikan saham, jumlah anggota dewan komisaris dan efektifitas komite audit Dependent : Pemilihan auditor eksternal diprosikan dari resignfikan <i>venue Control</i> : ukuran perusahaan, tingkat perputaran aset, <i>profitabilitas</i> dan <i>leverage</i> .	Regresi Logistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independent yang diteliti memiliki pengaruh positif Yang signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas
7	Cheng, L.T,W and T.Y Leung (2007)	Meneliti karakteristik demografi CEO yang mempengaruhi pilihan auditor.	Regresi Logistik	Bahwa perusahaan yang dikelola oleh CEO yang cenderung kurang terlibat dalam aktivitas manajemen laba maka akan lebih memilih auditor berkualitas yang lebih tinggi.

2.1.7. Pengembangan Hipotesis

a. Kepemilikan Saham

Di Asia sebagian perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang berkonsentrasi, masalah keagenan bergeser dari permasalahan antara pemegang saham dan agen

menjadi konflik antara pemegang saham pengendali (*controlling owner*) dengan pemegang saham minoritas (*minority owner*). Oleh karena itu, perlu adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi agar tercipta keselarasan dari seluruh kepentingan antara pemegang saham pengendali dan minoritas.

Pemegang saham yang memiliki kendali efektif atas perusahaan tidak hanya mampu menentukan bagaimana perusahaan dijalankan atau dioperasikan, melainkan bagaimana laba didistribusikan di antara pemegang saham di perusahaan tersebut. Kemudian memiliki implikasi dalam pemilihan auditor oleh perusahaan. Lin dan Liu (2009) menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi kepemilikan pemegang saham terbesar maka akan meningkatkan masalah keagenan yang akhirnya akan menyebabkan tata kelola perusahaan yang cenderung lemah karena pemegang saham pengendali ingin mempertahankan keuntungan yang mampu mereka dapatkan lewat pelaporan keuangan yang tidak transparan.

Dari penjelasan di atas maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut

Ha₁ : Tingkat kepemilikan saham institusional berpengaruh secara positif terhadap pemilihan auditor eksternal yang bereputasi.

Ha₂ : Tingkat kepemilikan saham manajerial berpengaruh secara positif terhadap pemilihan auditor eksternal yang bereputasi.

b. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dewan komisaris merupakan organ perorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Pada penelitian Chen (2005) dalam sebuah studi di China mengungkapkan bahwa ada pengaruh antara ukuran dari dewan komisaris dengan level tata kelola perusahaan karna semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Semakin sedikit anggota dewan komisaris akan mencerminkan mekanisme *corporate governance* yang semakin lemah sehingga akan memungkinkan adanya pengambilan keuntungan yang semakin besar oleh pemegang saham pengendali dan memungkinkan terjadinya fungsi monitoring yang tidak efektif bagi perusahaan, begitupun sebaliknya (Maharani, 2012). Anggota dewan komisaris yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu mampu memberikan nasihat penilaian dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut

Ha₃ : Tingkat ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap pemilihan auditor eksternal yang bereputasi.

c. Efektivitas Komite Audit

Setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komite audit yang independen. Tugas utama komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja

perusahaan. Terkait salah satu fungsi komite audit dalam hal pengawasan penyusunan laporan keuangan perusahaan, maka apabila peran komite audit benar-benar efektif, perusahaan seharusnya akan menyajikan laporan keuangan dengan kualitas audit yang tinggi.

Efektifitas peran komite audit dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang telah diteliti oleh Hermawan (2009) yaitu , independensi, aktifitas, ukuran dan kompetensi komite audit. Pengaruh karakteristik tersebut dilihat sebagai satu kesatuan dan diukur dalam skor. Apabila perusahaan memiliki skor efektifitas peran komite audit yang tinggi, maka komite audit seharusnya melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif, kemudian dapat memberikan informasi kepada perusahaan dalam memilih auditor eksternal dengan kualitas yang baik (Maharani, 2012).

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat yaitu

Ha₄ : Tingkat skor efektifitas komite audit berpengaruh secara positif terhadap pemilihan auditor eksternal yang bereputasi.

d. Studi komparatif mekanisme *Corporate Governance* terhadap pemilihan auditor eksternal untuk spesialisasi industri keuangan dan Non-Keuangan.

Perusahaan keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi utama menyalurkan dana dari yang surplus berlebih kepada mereka yang kekurangan dana. Perusahaan keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang

menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah dan memiliki pengendalian interes yang sangat terstruktur untuk menghindari adanya penyimpangan dalam perusahaan (Sunarto, 2010). Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan yang bisa mempengaruhi keputusan dalam penetapan *corporate governance* perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas di perusahaan keuangan mengingat masih lemahnya sistem regulasi di bidang pembiayaan.

Sistem Jasa keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan mempengaruhi produktifitas perekonomian nasional sehingga pengawasan dalam sistem keuangan sangatlah kompleks, dinamis dan saling terkait antar sektor – subsektor keuangan dalam hal produk maupun kelembagaan. Oleh karena itu pengawasan dilakukan oleh dua lembaga yaitu Bank Indonesia dan BAPEPAM yang dimonitoring oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia (Pakpahan, 2013)

Dari penjelasan di atas maka hipotesis selanjutnya yaitu

Ha₅ : Penerapan mekanisme *corporate governance* dalam pemilihan auditor eksternal yang berkualitas pada perusahaan keuangan lebih efektif dibandingkan perusahaan non keuangan.

2.1.8. Kerangka Pikir

Penerapan mekanisme *corporate governance* menjadi salah satu bentuk cerminan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemilihan auditor eksternal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memaksimalkan fungsi manajemen didalam perusahaan.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

